

Hutan dan Perubahan Iklim Setelah Durban

Sebuah Perspektif dari Asia Pasifik

April 2012



Pendapat yang dituangkan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan pendapat lembaga penyelenggara

Hutan dan Perubahan Iklim Setelah Durban
- Sebuah Perspektif dari Asia Pasifik

Hak cipta © RECOFTC, FAO, dan CoDe REDD April 2012
Bangkok, Thailand

Seluruh foto adalah milik RECOFTC

RECOFTC – The Center for People and Forests
PO Box 1111, Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel: +66 (0)2 940 5700
www.recoftc.org
Email: info@recoftc.org

FAO Regional Office for Asia and the Pacific
Maliwan Mansion, Phra Atit Road
Bangkok 10200, Thailand
www.fao.org

CoDe REDD Philippines
Care of Non-Timber Forest Products Exchange Programme
for South and Southeast Asia
92-A Masikap Extension, Barangay Central, Diliman,
Quezon City 1100, The Philippines
<http://ntfp.org/coderedd/>

Pendahuluan

Selama 2 tahun terakhir, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan RECOFTC-The Center for People and Forests, telah mengundang para pakar regional untuk mengkaji kembali hasil dari Konferensi Para Pihak (COP) ke 15 dan 16 dari UNFCCC. Hasilnya adalah buklet *Forests and Climate Change After Copenhagen: An Asia-Pacific Perspective* dan *Forests and Climate Change After Cancun: An Asia-Pacific Perspective* yang telah didistribusikan secara luas dan mendapat respon yang sangat baik.

Pada Februari 2012, RECOFTC, FAO, dan CoDe REDD, dengan dukungan dari GIZ-BMU, REDD-net, NORAD, ASFN, dan SDC, mengumpulkan 13 orang pakar kehutanan dan perubahan iklim di Quezon City, Filipina untuk mendiskusikan implikasi dari keputusan yang dibuat dalam COP 17, di Durban, Afrika Selatan pada bulan November dan Desember, terhadap sektor kehutanan di kawasan Asia Pasifik. Buklet ini merangkum tanggapan dari para pakar terhadap 13 pertanyaan utama yang diajukan selama workshop berlangsung.

Selain penghargaan kami atas kontribusi semua panelis, terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Regan Suzuki dan Marlea Muñoz yang telah mengatur berlangsungnya workshop serta kepada Ben Vickers, Jim Stephenson, dan Regan Suzuki yang telah menulis bersama publikasi ini. Tak lupa, kami berterimakasih atas dukungan yang sangat berharga dari para fasilitator di tiap sesi: Marlea Muñoz, Ben Vickers, Regan Suzuki, Jim Stephenson, Dr. Doris Capistrano dan Maria Cristina Guerrero, serta sambutan pembuka oleh Marlo Mendoza, Asisten Sekretaris Kementerian Lingkungan dan Sumber daya Alam Filipina serta Patrick Durst dari FAO kantor Regional Asia Pasifik.

13 Pertanyaan Utama



P1 Apakah yang terjadi dengan REDD+ di Durban?

P2 Apakah perundingan berjalan sesuai rencana?

P3 Sejauh mana jalan kita menuju kesepakatan internasional?

P4 Bagaimana REDD+ hendak didanai?

P5 Apakah dampak Durban terhadap pasar karbon sukarela pada sektor kehutanan?

P6 Apakah kesederhanaan dapat melemahkan kerangka pelindung (safeguards)?

P7 Apakah masyarakat yang bergantung pada hutan terlindungi?



P8

Jelaskah aturan perhitungan karbon hutan?

P11

Apakah yang terjadi dengan LULUCF?

P9

Bagaimana kita membangun kapasitas untuk MRV?

P12

Apakah yang akan terjadi dengan A/R CDM?

P10

Apakah perundingan REDD+ di Durban bersifat membangun untuk kawasan regional?

P13

Apakah peran hutan dalam adaptasi perubahan iklim?

Daftar Singkatan

A/R CDM	Aforestasi Reforestasi dalam Mekanisme Pembangunan Bersih	MRV	Pemantauan, pelaporan, pembuktian
ASEAN	Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara	NAPA	Rencana Langkah Adaptasi Nasional
ASFN	Jaringan Kehutanan Sosial ASEAN	RECOFTC	Pusat Pelatihan Hutan Masyarakat Regional untuk Asia dan Pasifik (Pusat untuk Masyarakat dan Hutan)
BMU	Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir	REDD	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
CBD	Konvensi untuk Keanekaragaman Hayati	REDD+	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ditambah pengelolaan hutan secara lestari, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan
CDM	Mekanisme Pembangunan Bersih	REL	Tingkat Emisi Referensi
CER	Pengurangan Emisi Bersertifikasi	RL	Tingkat Referensi
COP	Konferensi Para Pihak	RSPO	Diskusi untuk keberlanjutan Minyak Sawit
ETS	Skema Perdagangan Emisi (dari Komisi Eropa)	SBSTA	Badan Pemberi Saran Bidang Ilmiah dan Teknologi
FAO	Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa	SESA	Standar untuk Penilaian Sosial dan Lingkungan Hidup
FPIC	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa)	SDC	Badan Swiss untuk Pembangunan dan Kerjasama
FRA	Penilaian Sumber daya Hutan	UNCCD	Konvensi PBB untuk Memberantas Desertifikasi
GCF	Dana Iklim Hijau	UNDRIP	Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli
GHG	Gas Rumah Kaca	UNFCCC	Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim
GIZ	Kerjasama Internasional Jerman	VCS	Standar Karbon yang terverifikasi
LAPA	Perencanaan Langkah Adaptasi Lokal		
LCA	Langkah Kerjasama Jangka Panjang (Kelompok Kerja Ad-Hoc dengan UNFCCC)		
LULUCF	Tata guna lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan		
Norad	Badan Norwegia untuk Kerjasama Pembangunan		

Para Pakar

Ms. Anna Lehmann

LEAF Program
USAID
Thailand

Dr. Antonio GM La Viña

Ateneo School of Government
Filipina

Ms. Ivy Wong

World Wide Fund for Nature
Malaysia

Ms. Joan Carling

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Thailand

Mr. Lawrence Ang

Ateneo School of Government
Filipina

Mr. Maximilian Conrad

Kementerian Sumber daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Malaysia

Dr. Promode Kant

Institute of Green Economy (IGREC)
India

Mr. Resham Dangi

Kementerian Kehutanan dan Konservasi
Tanah, Nepal

Mr. Senson Mark

PNG Eco-Forestry Forum
Papua Nugini

Mr. Samreth Vanna

Administrasi Kehutanan, Kamboja

Dr. Suchitra Changtragoon

Departemen Taman Nasional, Konservasi
Alam Liar dan Tumbuhan, Thailand

Ms. Vicky Tauli-Corpuz

Tebtebba
Filipina

Mr. Yayan Hadiyan

Kementerian Kehutanan, Indonesia

P1

Apakah yang terjadi dengan REDD+ di Durban?



"Kemajuan dramatis yang terjadi di Cancun tidak berulang di Durban."

Joan Carling

"Penduduk lokal bertanya, Kapan uang REDD datang?"

Vanna Samreth

Perundingan di Durban mungkin tidak menghasilkan terobosan tentang REDD+ seperti halnya yang terjadi di Cancun, namun tampak jelas ada beberapa pergeseran penting dalam diskusi dan keputusan. Pesan REDD+ yang dihasilkan di Durban memperjelas tentang Tingkat Emisi Referensi (RELS)/Tingkat Referensi (RLs), kerangka pelindung lingkungan dan sosial, serta pemantauan, pelaporan dan pembuktian (MRV); meski juga meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pembagian manfaat.

Dalam pertemuan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) atau Badan Pemberi Saran Bidang Ilmiah dan Teknologi, sebuah keputusan untuk mengembangkan sebuah 'sistem informasi' untuk pelaporan pelaksanaan kerangka pelindung nasional REDD+ telah ditunda hingga Para Pihak lebih berpengalaman dalam mengimplementasikan REDD+. Saat ini, kerangka pelindung secara eksplisit dikaitkan dengan pembiayaan REDD+ dalam konteks Langkah Kerjasama Jangka Panjang (LCA), yang merupakan sebuah kemajuan penting.

Ada perdebatan yang belum terselesaikan mengenai sumber pembiayaan REDD+, meski pintu masih terbuka untuk pendanaan berbasis pasar. Pendanaan publik untuk REDD+ tetap dipertimbangkan oleh semua Pihak, terutama selama fase kesiapan, menggarisbawahi ketergantungan kepada dukungan donor untuk memperkuat tata kelola kehutanan, penegakan kerangka pelindung dan sistem MRV.

Keputusan dari Durban menawarkan sedikit arahan tentang bagaimana pendanaan REDD+ akan menjangkau para pemangku kepentingan lokal. Hal ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan bagi beberapa negara semisal Kamboja, di mana proyek percontohan REDD+ telah dilaksanakan dan harus menunjukkan bagaimana manfaat dapat disampaikan sebelum membangun kasus berbeda untuk menerapkan model tersebut di wilayah lain.

Secara umum, diskusi tentang pendanaan saat ini semakin terbuka dan kurang sengit dibanding yang terjadi dalam konferensi Para Pihak sebelumnya (COPs). Hal seperti ini diharapkan akan terus berlanjut sehingga dapat membantu memastikan perkembangan yang lebih besar bagi COP 18 di Qatar.

P2

Apakah perundingan berjalan sesuai rencana?

Ada kemajuan yang beragam selama perundingan. Banyak perwakilan yang datang ke Durban dengan harapan dapat mengamankan sebuah protokol seperti yang terjadi di Kyoto. Namun mereka kecewa, terutama dengan penarikan dukungan Kanada dan Jepang untuk kesepakatan-kesepakatan berikutnya. Sayangnya, sepertinya Protokol Kyoto dapat dikalahkan karena ketidakseriusan beberapa negara dalam Annex 1 dalam melaksanakan tanggung jawab penting mereka, yaitu usaha pembangunan emisi tinggi yang memungkinkan mereka menuju perekonomian industri.

Perkembangan positif utama COP 17 adalah penciptaan landasan Durban untuk Peningkatan Aksi, berdasarkan minat negara-negara berkembang penghasil emisi tinggi seperti Cina dan India, untuk berkomitmen terhadap pengurangan emisi di masa depan-- yang sejauh ini menjadi faktor pengikat yang utama. Ini mengantarkan ke sebuah tahapan ter baru dalam perundingan dan membuka banyak kesempatan untuk dialog konstruktif antara negara maju dan negara berkembang.

Namun, ini juga berarti bahwa prinsip sama namun berbeda tanggung jawab' juga semakin melemah. Oleh karenanya, masih perlu dikaji ulang apakah ini benar-benar menjadi langkah konstruktif dari pandangan negara-negara Asia Pasifik, alih tindakan terpuji dari India dan Cina. Persoalan tentang sejarah kesetaraan antar Para Pihak juga tidak boleh dilupakan.

Mengejutkan bahwa hanya muncul sedikit protes di kalangan lembaga pemerintah dan sektor swasta di Cina dan India terhadap prospek pengurangan emisi di masa depan. Pada prinsipnya, sepertinya industri tidak bertentangan dengan pengurangan emisi, sebagian karena efisiensi energi bermanfaat bagi bisnis dan menjadi alternatif biaya rendah (atau tanpa biaya). Selain itu, mereka mengantisipasi semakin mudahnya pengurangan emisi dan penghilangan yang akan terjadi lewat kesepakatan transfer teknologi yang saat ini masih dalam proses perundingan.

Optimisme ini bertentangan dengan ketakutan negara-negara industri yang tercantum di aneks 1. Meski demikian, kawasan Asia Pasifik perlu mencapai prioritas regional dalam menyeimbangkan adaptasi dan mitigasi, sembari menemukan peran yang tepat untuk REDD+ dan pendekatan koheren secara regional.

"Gelas REDD telah separuh penuh, bukan kosong separuh."

Resham Dangi

"Usaha yang jauh lebih keras diperlukan oleh negara maju untuk menyesuaikan dengan kompromi yang telah dibuat oleh India dan Cina."

Vicky Tauli-Corpuz

"Jalan yang bergelombang harus ditempuh oleh negara-negara di wilayah Asia Pasifik."

Ivy Wong

"Ketika Anda mengambil buah yang bergantung rendah untuk mengurangi emisi, buah-buah lain muncul seiring kemajuan teknologi."

Promode Kant



P3

Sejauh mana jalan kita menuju kesepakatan internasional?

Prakiraan akan tidak adanya kesepakatan internasional sebelum tahun 2020 sudah diberitakan secara luas. Salah satu masalah utamanya adalah situasi perundingan itu sendiri, yaitu tidak berlanjutnya perkembangan yang ada. Umumnya masing-masing Pihak tetap berada pada posisi yang sama sepanjang tahun dan hanya membuat kesepakatan mi selama 3 hari saat COP berlangsung. Telah lebih dari 10 tahun dihabiskan dalam situasi ini dan mungkin saja kita akan berada dalam situasi yang sama hingga sepuluh tahun ke depan.

Kunci kemajuannya adalah apa yang diangkat dalam landasan Durban, yaitu dihilangkannya pembatas antara negara maju dan negara berkembang. Beberapa negara semisal Korea Selatan dan Meksiko dengan efektif telah merubahnya secara sukarela, menyatakan status baru mereka sebagai negara-negara berpendapatan menengah. Negara penghasil emisi terbesar yaitu China dan India, juga telah menetapkan langkah untuk berkomitmen terhadap pengurangan emisi. Satu tantangan utama ke arah kesepakatan adalah Amerika Serikat. India dan Cina memiliki struktur politik internal yang memungkinkan mereka untuk memutuskan kesediaan bergabung dengan kesepakatan internasional, jika pemerintahan mereka menganggap keputusan ini tepat. Namun lain halnya dengan Amerika Serikat, dan ini seperti ini tidak akan berubah.

Semakin diulang mantra bahwa kesepakatan tidak dapat dicapai tanpa Amerika Serikat, semakin yakinlah mereka akan kekuatan 'tidak memilih', yang bisa berakibat terhentinya proses dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Inilah penyebab kenapa para perunding membicarakan tentang kesepakatan sektoral (misal untuk REDD+) sebagai langkah maju yang potensial daripada menunggu keputusan bulat dari peserta perundingan.

REDD+ menjadi semacam iklan yang bermanfaat secara bertahap dengan pendekatan selangkah demi selangkah. Kemajuan diskusi REDD+ di UNFCCC berjalan lebih cepat dibandingkan tempat lain karena keyakinan yang terbentuk bahwa kemajuan secara bertahap ini telah didorong. Sifat kumulatif perundingan REDD+ telah meninggalkan potongan besar tanpa adanya perbedaan pandangan yang substantif antara Para Pihak dalam perundingan REDD+. Pembicaraan sekarang berfokus pada isu-isu teknis dan implementasi daripada ideologi yang berkaitan erat dengan perdebatan pendanaan pasar dengan nonpasar.

Di kawasan Asia Pasifik, banyak pemerintah yang berpikiran sejalan untuk berbagi tanggung jawab melindungi hutan demi generasi mendatang. Jika sekiranya sektor lain mampu mengikuti, kita mungkin bisa melangkah untuk mengikat kesepakatan lebih cepat daripada yang direncanakan; meskipun beberapa kesepakatan regional lain juga akan didukung melalui target-target sektoral yang berhubungan. Meskipun demikian, jika memang REDD+ masih merupakan satu-satunya sumber kemajuan yang nyata, perjalanan kita masih sangat panjang, dengan kesempatan yang kecil untuk berhasil dalam mengatasi perubahan iklim.

"Kita baru saja kehilangan satu dekade dalam perjuangan melawan perubahan iklim."

Tony La Viña

"Apakah REDD+ hanya untuk dirinya sendiri atau dapat menjadi sarana untuk melawan perubahan iklim?"

Ivy Wong



P4

Bagaimana REDD+ hendak didanai?

Perbedaan antara pendukung pendekatan pasar dan nonpasar terhadap pendanaan REDD+ di Durban kurang begitu digaugkan dibandingkan sebelumnya, menunjukkan semakin besarnya pemahaman tentang hal ini dari segala sisi. Mempertimbangkan posisi perekonomian global di mana kantong publik telah menipis, sehingga, sepertinya sumber pendanaan harus berasal dari sumber-sumber selain dari para donor multilateral dan bilateral.

Dari manapun sumbernya, pendanaan REDD+ di bawah kesepakatan REDD+ harus baru, bersifat menambahkan dan berkaitan dengan hasil. Meskipun pendanaan untuk fase 'kesiapan' sebagian besar ditargetkan pada pembangunan kapasitas, namun tidak selalu berdasarkan performa. Dengan bantuan dari program-program multilateral seperti UN-REDD dan FCPF, saat ini beberapa negara bergerak menuju pendekatan pendanaan yang bertujuan untuk memaksimalkan usaha-usaha untuk mengaitkan pembayaran dengan hasil. Untuk saat ini, kontribusi keuangan publik sangat dibutuhkan dalam fase kesiapan, namun sumber-sumber pendanaan yang lebih luas harus tersedia untuk implementasi REDD+ bagi keberhasilan pemantauan, pelaporan dan pembuktian.

Pendanaan berbasis pasar tidak selalu berarti dikeluarkannya 'kredit REDD+' yang dapat diperdagangkan. Investasi sektor swasta dapat juga diinvestasikan dalam kegiatan semisal pengembangan dan peningkatan tata kelola hutan, sistem sertifikasi dan standar pengelolaan baru dan promosi komoditas-komoditas yang dikelola secara lestari, semisal kopi dan karet. Adanya semacam insentif yang inovatif dapat berkontribusi untuk memenuhi tujuan-tujuan REDD+ dan potensial untuk memunculkan minat dari sumber-sumber semacam dana pensiun dan dana investasi negara, meski tidak selalu menghasilkan kredit-kredit yang dapat diperdagangkan.

Beberapa negara seperti Jepang, berharap untuk melangkah lebih maju secara bilateral dengan skema imbal-balik karbon dan aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan pendanaan di dalam kawasan, namun belum jelas mengenai cara pelaporannya ke UNFCCC. Para donor berharap mendapatkan pengakuan untuk investasi yang telah dilakukan. Namun, negara-negara penerima bantuan potensial seperti Malaysia khawatir akan kehilangan hak untuk melaporkan aktivitas-aktivitas REDD+ yang bertentangan dengan komitmen-komitmen masa depan mereka di bawah landasan Durban.

Pilihan pendanaan untuk REDD+ sama beragamnya seperti penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Akhirnya, pilihan yang tepat sangat tergantung pada konteks nasional dan pendekatan yang dapat diterima serta cocok di tingkat lokal. Ini adalah masalah spesifik yang khas di tiap negara dan beragam di tiap wilayah di Asia Pasifik.

"Lembaga donor harus menunjukkan kepada para pembayar pajak bahwa pendanaan menghasilkan pengurangan emisi."

Anna Lehmann

"Beberapa negara sebaiknya mulai mengimplementasikan aktivitas-aktivitas REDD+ bahkan sebelum pendanaan internasional terwujud."

Vanna Samreth

P5

Apakah dampak Durban terhadap pasar karbon sukarela pada sektor kehutanan?

Dibandingkan dengan pasar wajib di bawah UNFCCC, VCM tidak signifikan dalam hal ukuran, namun menjadi alat yang berharga untuk menguji coba metode dan mendapatkan pengalaman. VCM memperbolehkan negara-negara untuk memanfaatkan tahun-tahun sebelum mulai mengikatnya kesepakatan internasional dengan mencoba dan memantapkan kembali pedoman, standar dan kebiasaan terbaik dan dengan membangun kapasitas untuk mekanisme wajib REDD+. Namun, ini jangan dilihat sebagai sebuah alternatif bagi mekanisme itu sendiri.

Sejatinya, VCM dipicu oleh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan fokus ini berbeda dengan kewajiban pasar karbon yang dipicu oleh komitmen dari negara-negara yang tercantum dalam aneks 1 di bawah Protokol Kyoto. CSR tidak perlu khawatir terkesan kuno dan oleh karenanya, tidak terpengaruh sama sekali oleh hasil COP 17.

Banyak organisasi sosial madani dan pemerintahan di kawasan Asia Pasifik berhati-hati terhadap VCM, terutama yang berhubungan dengan penerimaan sosial dari metodologi yang dilakukan. Papua Nugini dan Filipina, mengalami kerugian dari ulah 'para koboi karbon' dan sedang dalam proses legislatif untuk melindungi komunitas yang rentan tereksploitasi. Namun, kebanyakan proyek VCM sekarang terakreditasi berdasar satu atau lebih standar yang dipakai, semisal Verifikasi Karbon Standar (VCS). Hal ini semakin menguat, setidaknya sama ketat dengan CDM dalam hal integritas sosial dan lingkungan.

Dari basisnya yang rendah saat ini (sekitar 0.02% dari kewajiban pasar), jumlah proyek-proyek kehutanan VCM dipastikan akan meningkat mengingat banyaknya perusahaan yang ingin menetralkan jejak karbon mereka. Beberapa negara di kawasan melihat VCM sebagai jembatan untuk pemenuhan mekanisme REDD+ di masa depan serta diharapkan pula untuk meningkatkan keterlibatan dalam pengembangan proyek-proyek ini. Contohnya, pemerintah bisa memberikan pedoman tentang tipe-tipe proyek yang ingin mereka pantau, atau standar-standar yang diharapkan dapat diikuti oleh para pengembang proyek. Intinya, seperti halnya, VCM diharapkan memiliki dampak lebih bagi masa depan COPs, bukan kebalikannya.

"Pembelajaran dari VCM penting bagi desain pasar wajib REDD+."

**Suchitra
Changtragoon**



P6

Apakah kesederhanaan dapat melemahkan kerangka pelindung?

Masalah utama yang berhubungan dengan kerangka pelindung bukan hanya sekedar kesederhanaan namun kepada substansinya. Banyak NGO merasa bahwa diskusi-diskusi di Durban tidak berjalan baik dalam melindungi kesepakatan Cancun, dengan merubah peraturan yang ketat dengan sekedar pedoman umum. Namun, semakin detil yang tercantum dalam keputusan COP, semakin sulit pelaksanaannya bagi pemerintah nasional, sehingga dapat menurunkan keinginan beberapa negara untuk mengaplikasikan kerangka pelindung ini. Contohnya, Indonesia telah melakukan penelitian tentang pengembangan sistem informasi perlindungan untuk REDD+ dan akan bermasalah jika bahasa yang dipakai di Durban terbebani oleh terlalu banyak detil.

Hasil dari Durban mencoba menyentuh tingkat menengah serta menyadari bahwa banyak negara membutuhkan beberapa tahun pengalaman kesiapan REDD+ sebelum berkomitmen untuk sebuah sistem pelaporan kerangka pelindung. Di dalam inti kesepakatan terdapat persyaratan untuk setiap negara partisipan REDD+ untuk melaporkan bahwa mereka telah memunculkan semua elemen kerangka pelindung lewat peraturan. Langkah hukum ini harus dikembangkan lewat konsultasi secara penuh dan efektif. Diharapkan, keputusan Durban akan memungkinkan lebih banyak negara untuk mengaplikasikan kerangka pelindung secara lebih spesifik.

Meskipun tergolong konsep baru, sebagian besar negara-negara Asia Pasifik saat ini mulai terbuka bagi konsep persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa), yang merupakan perkembangan yang baru dan positif.

Dari pandangan para penduduk asli, semua kerangka perlindungan yang direfleksikan dalam Kesepakatan Cancun harus diimplementasikan dengan mengindahkan perundingan yang telah dilakukan. Ketika negara-negara belajar tentang pengelolaan hutan secara lestari dan ketika hak-hak masyarakat asli menjadi semakin kuat, hal ini akan mempengaruhi negosiasi yang dilakukan.

Untuk meningkatkan keefektifannya, sangat penting untuk memasukkan kerangka perlindungan dalam daftar pengembangan pendanaan di Durban. Hal ini menggarisbawahi kepentingan bersama para NGO, donor, dan pemangku kepentingan swasta untuk memastikan bahwa semuanya dihormati.



"Negara-negara tidak lagi memainkan kartu kedaulatan terhadap kerangka pelindung."

Tony La Viña

"Di tingkat nasional, Anda harus menemukan di mana kerangka pelindung harus ketat dan di mana harus lebih sederhana."

Yayan Hadiyan

"Masyarakat yang memiliki andil paling besar di hutan harus memiliki suara terbanyak dan dukungan agar suara mereka terdengar."

Vicky Tauli-Corpuz



P7

Apakah masyarakat yang bergantung pada hutan terlindungi?



“Masyarakat asli dan penduduk lokal memiliki hak untuk menentukan manfaat seperti apa yang mereka butuhkan.”

Joan Carling

“Di Durban, kita menekankan pentingnya akses untuk jasa lingkungan bagi masyarakat asli.”

Vicky Tauli-Corpuz

Sebuah konsensus yang jelas tentang lebih baiknya kondisi masyarakat yang bergantung kepada hutan setelah Durban ternyata tidak terwujud. Satu poin umum adalah tekanan tentang perbedaan antara masyarakat asli dan penduduk lokal, dan pengakuan terhadap perlindungan terhadap mereka lewat perlindungan REDD+, terutama berhubungan dengan padiatapa. Kecuali hak legal perbedaan mereka untuk padiatapa diakui di bawah REDD+, banyak kelompok-kelompok masyarakat asli khawatir bahwa identitas mereka akan tergerus.

Sumber kesalahpahaman lain adalah bentuk manfaat REDD+ yang didapat oleh penduduk yang bergantung pada hutan. Asumsi beberapa perunding adalah bahwa manfaat akan didistribusikan lewat semacam pembayaran tunai. Ini sepertinya bukan yang terjadi di beberapa kasus. Selain itu, terdapat risiko bahwa jika impresi tersebut dikomunikasikan dengan penduduk lokal, dapat berakibat munculnya ide-ide yang tidak realistis mengenai bagaimana REDD+ akan berjalan. Di tingkat komunitas, manfaat yang paling tepat umumnya adalah layanan sosial semisal sekolah dan klinik, serta dukungan untuk penghidupan berbasis hutan, di mana penggunaan REDD+ secara bijaksana dapat terlaksana.

Eksplorasi pengetahuan pribumi adalah aspek kunci dari perlindungan hak-hak lokal di bawah REDD+. Ini dapat menyebabkan konflik antara dan di tengah-tengah komunitas dan membutuhkan perhatian serius sebelum pedoman tentang pengetahuan pribumi ini dikembangkan untuk perlindungan REDD+.

Terdapat pula risiko bahwa kesetaraan gender tidak akan dipertimbangkan dengan tepat dalam proses konsultasi REDD+, padiatapa dan perlindungan lain. Ini dapat menyebabkan timbulnya marginalisasi lebih jauh bagi sebuah kelompok yang sudah terlanjur rentan.

Dari kesemuanya, hak-hak mereka yang bergantung pada hutan berkaitan erat dengan adaptasi perubahan iklim. Bolivia mendorong pengakuan REDD+ sebagai sebuah mitigasi gabungan dan mekanisme adaptasi sebelum mereka sepakat dengan laporan REDD+, sebuah posisi yang didukung oleh banyak negara-negara Asia Pasifik.



P8

Jelaskah aturan perhitungan karbon hutan?

Di Durban, muncul beberapa kesepakatan tentang bagaimana sistem perhitungan karbon harus dibentuk bagi REDD+. Tingkat referensi akan dipakai sebagai acuan untuk mengakses performa sebuah negara, namun negara-negara itu sendiri yang akan menentukan bagaimana membentuk RL dengan cara yang transparan, lengkap, dan konsisten; dengan acuan pada profil emisi sekarang. Hal ini penting dan inovatif. Terutama, karena ini berbeda dengan peraturan cara penghitungan LULUCF yang telah dibentuk pada tahun 1997, di mana saat itu informasi sangat tidak lengkap sehingga para perunding menyusun prosedur-prosedur penghitungan yang kompleks. Akibatnya, terkadang justru menghambat, bukan membantu usaha-usaha untuk mengurangi emisi dari tata guna lahan dan sektor-sektor kehutanan.

Namun, perkembangan RL nasional masih merupakan tugas yang sulit. Kebanyakan negara telah memulai dengan melihat catatan emisi historis dan praktiknya. Jika ini bisa menjadi sebuah permulaan yang baik, data historis akan dibutuhkan untuk dikombinasikan dengan proyeksi emisi masa depan. Seiring dengan berubahnya pemicu secara konstan, tidak ada jaminan bahwa tren catatan deforestasi dan degradasi di masa masa lalu akan berlanjut, terutama memperhatikan pemicu dari sektor ekonomi, semisal pasar komoditas pertanian.

Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur industri-industri yang menyebabkan perubahan tata guna lahan (mis: minyak sawit) harus dilibatkan dalam menentukan RL yang tepat untuk mempertimbangkan komoditas dengan target dan subsidi produksi yang spesifik. Ini akan membantu dalam mengembangkan prakiraan biaya yang akurat jika membutuhkan perubahan untuk peraturan. PNG merupakan kasus menarik di mana memungkinkan untuk menggunakan standar diskusi untuk keberlanjutan minyak sawit (RSPO) sebagai dasar tingkat referensi, sehingga mandat dan standar yang berlaku di semua negara dapat didukung lewat pendanaan REDD+.

Salah satu pesan positif dari Durban adalah kita tidak harus melakukannya dengan benar-benar tepat di permulaan. Contohnya, Guyana telah mengembangkan sebuah RL yang telah dipertanyakan oleh komunitas akademis, namun ini menjadi titik awal bagi negara tersebut untuk membangun dan mengembangkannya seiring berjalannya waktu.

"Kita tidak diminta untuk menjadi pesulap untuk REDD+, menjentikkan angka dari udara, seperti yang kita lakukan untuk LULUCF."

Tony La Viña

"Dengan banyaknya pemicu yang berhubungan dengan tata kelola, bukan hanya celah keberadaan pakar teknis yang menjadi masalah, departemen di pemerintahan juga harus berbicara satu sama lain."

Anna Lehmann

"Pendekatan langkah-bijak mampu membangun kepercayaan nasional untuk menghasilkan RELs."

Resham Dangi



P9

Bagaimana kita membangun kapasitas untuk MRV?

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki titik awal yang berbeda dalam konteks MRV. India melaksanakan inventarisasi hutan secara nasional setiap 2 tahun, sementara Malaysia sedang melakukan inventarisasi hutan selama periode 50 tahun. Nepal baru saja menyelesaikan inventarisasi penuhnya yang pertama dalam 17 tahun, sementara beberapa negara justru belum memulainya sama sekali. Pemantauan hutan dan metode penghitungan karbon seharusnya dibuat sesederhana mungkin untuk aplikasi jangka panjang, bahkan di bawah mekanisme REDD+. Beberapa negara semisal Kamboja, khawatir jika pedoman perhitungan hutan seperti yang didiskusikan di Durban akan di luar jangkauan kapasitas mereka.

Transfer teknologi masih menjadi prioritas untuk negara-negara berkembang selama berjalannya perundingan Durban dan masih penting untuk REDD+ dalam konteks adaptasi. Namun, seharusnya prosesnya tidak dibatasi dari hanya Utara ke Selatan. Terutama, kesempatan-kesempatan untuk transfer teknologi Selatan-Selatan yang sangat berguna. India contohnya, dapat menjadi penghubung untuk Asia Selatan dan wilayah lainnya, dalam pengindraan jarak jauh dan pemantauan hutan. Hal ini dirasa cukup tepat mengingat persamaan ekosistem di banyak wilayah, semisal di lembah sungai Mekong atau Ganga.

Lebih jauh lagi, transfer teknologi dapat terjadi di tiap negara. Sistem informasi kehutanan yang lebih transparan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembangunan kapasitas REDD+. Contohnya, departemen kehutanan harus memprioritaskan pembangunan landasan pengetahuan sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi, data dan teknologi.

MRV dapat lebih aksesibel apabila negara-negara mengambil pendekatan 'langkah-bijak'. Dengan permulaan ini serta penggunaan data dari FAO- supported Global Forest Resources Assessments (FRA), diikuti dengan pengembangan faktor emisi generik yang diakses dan dikembangkan terus-menerus, pada akhirnya, kondisi nasional dan faktor-faktor lingkungan turut pula menentukan. Kunci suksesnya adalah praktik atau pembelajaran langsung.

Negara-negara lain di wilayah sekitar dapat belajar dari pengalaman Nepal dengan hutan kemasyarakatannya, yang menunjukkan bahwa MRV tidak hanya untuk 'pakar'. Mereka harus mengembangkan kerangka kerja MRV yang dapat diaplikasikan secara lokal untuk mengurangi biaya dan memungkinkan keterlibatan komunitas lokal di tempat yang tepat. Pentingnya pelibatan ini terutama karena mempertimbangkan bahwa MRV untuk REDD+ harus diperhitungkan dalam perlindungan sosial. Hal ini mungkin melibatkan kompromi tertentu dalam konteks akurasi dan verifikasi, kendati masih belum yakin bahwa kapasitas MRV dapat dikembangkan, kecuali, dengan biaya yang sangat mahal.

"Ruang lingkup MRV bergerak sangat cepat; apa yang kita pelajari 2 tahun lalu saat ini sudah kuno."

Resham Dangi

"Kita tidak bertujuan untuk menyediakan keputusan bagi pemerintah, namun untuk membantu mereka menemukan alat untuk mengembangkan RELs dan RLs."

Lawrence Ang

P10

Apakah perundingan REDD+ di Durban bersifat membangun untuk kawasan regional?

"Kami menjalani banyak diskusi nasional tentang REDD+ namun pengetahuan yang dihasilkan tidak disebarluaskan secara efektif."

Maximilian Conrad

"Sebagai negara dengan pasar yang besar, kita dapat mulai menyiapkan REDD+ sebagai sebuah peluang investasi."

Lawrence Ang

"Penundaan kesepakatan berikutnya dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan – mempelajari dari beberapa contoh di dalam wilayah dan bersiap untuk mekanisme jika saatnya tiba."

Senson Mark

Pertemuan para pemangku kepentingan nasional dan internasional yang mengawali Durban secara pasti telah berkontribusi terhadap kemajuan penting REDD+. Penundaan kesepakatan pengganti untuk Kyoto akan memungkinkan lebih banyak waktu untuk melanjutkan kemajuan ini dan memastikan bahwa wilayah tersebut siap untuk peluncuran kewajiban berdasar REDD+, jika dan ketika saatnya tiba.

Masyarakat asli di kawasan telah mulai menjangkau para aktor tingkat negara dan lainnya lewat dialog REDD+ dengan cara yang jarang mereka lakukan sebelumnya. Hubungan dan pemahaman antara masyarakat asli dan Bank Dunia telah berkembang dengan pesat, menghasilkan perkembangan yang penting terhadap Bank's Standards for Social and Environmental Assessment (SESA) dan kesempatan untuk memungkinkan masyarakat asli menentukan wakil mereka dalam diskusi. Fakta bahwa prinsip-prinsip kerangka perlindungan sosial, termasuk padiatapa yang tidak dipertentangkan di Durban, dapat dianggap sebagai hasil dari dialog yang konstruktif dan suksesnya lobi-lobi dalam kelompok masyarakat madani.

Dialog internasional tingkat tinggi tentang REDD+ yang mengawali Durban telah berdampak cukup penting bagi negara-negara untuk menghasilkan kesepakatan. Namun dialog internal dalam wilayah negara-negara Asia Pasifik tidak selalu konstruktif. Banyak pertemuan dilaksanakan dengan tergesa-gesa yang justru mengurangi partisipasi. Untuk keefektifan acara seperti ini, mereka harus menindaklanjuti dengan komunikasi yang intens dan pelayanan pendukung oleh para pakar independen dan mumpuni. Saat ini, terdapat kebutuhan yang tinggi akan kelompok pakar REDD+ tingkat regional untuk mengurangi ketergantungan terhadap para pakar internasional dan memastikan bahwa salah informasi mengenai REDD+ tidak menyebar.

Dialog untuk menciptakan kondisi yang seragam dalam perundingan dapat menggarisbawahi stabilitas relatif pendanaan dan politik kawasan, kesempatan untuk menguji coba ide-ide seperti pendekatan nested dalam konteks negara kepulauan (Filipina dan Indonesia) dan potensi untuk menciptakan MRV yang seragam serta sistem pendanaan semacam Amazon Fund. Ini memunculkan atmosfer positif untuk kolaborasi regional REDD+. Oleh karena itu, negara lain harus mengambil manfaat dari berbagai landasan pembelajaran regional yang telah ada.

P11

Apakah yang terjadi dengan LULUCF?

"Terdapat firewall (tembok pemisah) di antara LULUCF dan REDD+, namun mereka masih tetap informatif."

Lawrence Ang

"Tidak adanya perlindungan dalam LULUCF menyoroti standar ganda dalam proses UNFCCC."

Vicky Tauli-Corpuz

Di Durban, perhitungan hutan menjadi sebuah aktivitas wajib untuk inventarisasi emisi gas rumah kaca (GHG), yang akan dapat diaplikasikan bagi semua negara di bawah landasan Durban, tidak hanya bagi negara-negara industri seperti yang terjadi saat ini. Negara-negara tersebut kemudian akan mengembangkan dan menyerahkan RL nasional mereka dan dapat mengklaim aktivitas-aktivitas untuk mencapai titik di bawah level perhitungan terhadap komitmen mereka, hingga batas 3.5% dari total penghilangan GHG. Perkembangan lain dari Durban adalah inklusi HWP dalam perhitungan karbon hutan. Penting bahwa negara-negara Asia Pasifik mengerti bagaimana inovasi-inovasi ini bisa berjalan.

Gangguan-gangguan alam juga diperhitungkan dalam LULUCF. Ini artinya, misalnya, bahwa sebuah negara yang sering mengalami kebakaran hutan seperti Australia, dapat memasukkan 'level background' ini dalam RL LULUCF. Baik masalah ini maupun HWP, keduanya sangat berhubungan dengan REDD+.

Namun demikian, Durban gagal menyediakan tingkat kedetilan dalam metode perhitungan LULUCF seperti yang diharapkan. Diskusi tentang sistem pembuktian untuk akurasi tingkat emisi negara-negara aneks 1 masih terus berjalan. Tersedia peran bagi negara-negara Asia Pasifik untuk terlibat dalam pengembangan sistem pembuktian ini.

Perhatian lain adalah meskipun Negara-negara aneks 1 dan NGO secara tepat mendorong pemerintah-negara-negara Asia Pasifik untuk mengimplementasikan kerangka pelindung REDD+, mereka tidak melakukan hal serupa terhadap aktivitas-aktivitas mereka terkait LULUCF.

Para pakar dengan jumlah yang setara dari negara-negara maju dan berkembang harus diundang untuk meninjau laporan LULUCF. Sistem peninjauan yang ada saat ini sudah cukup transparan, namun ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kawasan untuk membangun semacam kelompok pakar untuk mengaudit dan memvalidasi emisi GHG dari sektor kehutanan. Keahlian semacam ini dapat diadaptasikan dalam REDD+, sehingga verifikasi Selatan-Selatan dari perhitungan REDD+ dapat diwujudkan di masa mendatang, tidak lagi dimonopoli oleh para pakar dari negara maju. Agar hal ini tercapai pada tahun 2020, saat perbedaan antara negara-negara aneks 1 dan nonaneks 1 secara efektif lenyap, negara-negara Asia Pasifik harus meminta dukungan untuk mengembangkan kapasitas yang dibutuhkan tersebut.

P12

Apakah yang akan terjadi dengan A/R CDM?

Kita belum tahu apakah atau bagaimana CDM bisa cocok di bawah landasan Durban. Para investor membutuhkan kejelasan, maka jika kita tidak mendapatkan jawaban segera, mekanisme investasi mungkin akan habis di tahun 2015.

A/R CDM adalah bagian yang sangat kecil dalam mekanisme CDM secara keseluruhan. Meski jumlah proyeknya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai hampir 30 buah di seluruh dunia, namun masih kurang dari 1% dari total jumlah proyek-proyek CDM, dan bahkan proporsinya lebih kecil dari total yang dihasilkan dari pengurangan emisi bersertifikasi (CERs). Selain itu, kesempatan untuk berkembang lebih jauh di kawasan Asia Pasifik sangatlah kecil. Mekanisme ini masih terbatas pada lahan yang belum ber hutan di tahun 1990 dan kebanyakan area yang masuk kriteria ini diprioritaskan untuk produksi pertanian. Hal ini tidak dapat digunakan untuk memperbaiki lahan ber hutan yang telah terdegradasi yang hanya memenuhi definisi hutan berdasar kepadatan minimum tajuk.

Meski demikian, pendekatan aforestasi/reforestasi dapat sangat berguna bagi negara-negara yang tidak memiliki potensi REDD+ yang besar. Terdapat kemungkinan-kemungkinan menarik untuk merubah peraturan tentang A/R CDM agar lebih menarik bagi para investor. Contohnya, CER sementara (tCER) yang hanya dipakai untuk proyek-proyek A/R CDM, ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran terhadap permanensi di sektor kehutanan, namun adalah alasan kunci mengapa minat sektor swasta sangatlah rendah.

Para investor menginginkan kredit yang mudah ditukar dan siap diperdagangkan, yang tidak mungkin bagi tCER. Penyangga risiko dipakai dalam pasar sukarela (semisal VCS) untuk mengatasi permanensi. Penyangga tersebut bertindak seperti jaminan untuk permanensi kredit yang diperdagangkan di pasaran, namun tidak seperti dengan tCER, kredit dari proyek REDD+ yang dipakai dalam VCS adalah kredit yang sangat mudah ditukar dengan kredit dari tipe-tipe proyek lain. Belum jelas bagaimana risiko permanensi akan diarahkan dalam mekanisme kewajiban REDD+ yang potensial dan apakah penyangga yang ada di level nasional dan internasional dapat menjadi sebuah pilihan.

“Peraturan kelayakan lahan di bawah A/R CDM menempatkannya di bawah batas yang rentan. Kecuali peraturan berubah, tidak akan ada ekspansi besar yang terjadi.”

Promode Kant

“Bagi para investor, REDD+ lebih menarik dibandingkan A/R CDM. Ini disebabkan karena kredit A/R CDM hanya berlaku selama 5 tahun.”

Anna Lehmann

P13

Apakah peran hutan dalam adaptasi perubahan iklim?

Hutan bukan hanya sekedar jaring pengaman di saat keadaan mendesak, namun juga merupakan basis penghidupan pedesaan di banyak wilayah di Asia Pasifik. Nilai-nilai ini, sayangnya belum tercakup dalam perundingan. Saat REDD+ ditunjuk menjadi alur mitigasi di bawah UNFCCC, banyak komentator termasuk masyarakat asli berpikir bahwa itu akan menjadi dua hal yaitu adaptasi dan mitigasi.

Ini adalah sebagian alasan kenapa terlihat sangat penting untuk mendorong kerangka pelindung yang kuat, yang mampu menjangkau bermacam isu yang akan dijamin oleh pendekatan adaptasi. Persoalan kategorisasi ini sekali lagi menjadi penting dalam konteks Green Climate Fund (GCF). GCF memiliki 'kantong' untuk adaptasi dan mitigasi, namun belum jelas di mana REDD+ akan terletak. Ide terbaik mungkin menyarankan 'kantong' yang berbeda bagi REDD+ untuk mengakui peran gandanya.

Beberapa negara telah mengambil langkah konkrit untuk mengakui peran hutan dalam strategi adaptasi. Hutan adalah elemen utama dari National Adaptation Plan of Action (NAPA) di Nepal. Ini adalah usaha besar untuk menginstitusikan adaptasi perubahan iklim menjadi perencanaan pengembangan lokal (atau LAPAs) dan banyak dari rencana ini terjadi dalam kelompok-kelompok pengguna hutan kemasyarakatan. Mandat NAPA adalah bahwa 80% pendanaan untuk adaptasi ditujukan langsung bagi proses LAPA yang mungkin menghasilkan beberapa pelajaran tentang pembagian manfaat REDD+.

Di Durban, proposal Bolivia untuk menciptakan mekanisme pendanaan ganda mitigasi-adaptasi untuk REDD+ merupakan sebuah perkembangan yang sangat positif dan mendapat dukungan dari negara-negara Asia Pasifik, terutama Filipina. Saat ini, debat REDD+ mungkin adalah kerangka kerja terbaik untuk memastikan bahwa elemen-elemen adaptasi direfleksikan dalam agenda kehutanan UNFCCC. Namun, proses-proses lain juga penting untuk tujuan ini semisal UNFF, CBD dan forum antarpemerintah regional seperti ASEAN.

Tanpa perhatian yang serius, cukup besar kemungkinan agenda REDD+ dan adaptasi saling melemahkan satu sama lain. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara Asia Pasifik untuk memastikan bahwa jalur perundingan ini berhubungan satu sama lain dan memperhatikan secara terus menerus di mana potensi hubungan ini berada.

"Dalam bidang kehutanan, perbedaan antara mitigasi dan adaptasi hanya sekedar karangan."

Resham Dangi

"Kita harus menghargai REDD+ yang telah membawa isu adaptasi ke dalam agenda kehutanan."

Vicky Tauli-Corpuz

"Kita harus mendorong inklusi hutan dalam kesepakatan internasional lain saat kita diperhatikan."

Maximilian Conrad





Dicetak pada kertas daur ulang

Dengan dukungan dari



Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety



Norad



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC